

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai sektor ekonomi yang berbeda di setiap wilayahnya. Struktur ekonomi suatu wilayah juga dapat berbeda dengan wilayah lainnya. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara dalam periode tertentu, yang tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Jonathan *et al.*, 2023).

Sektor ekonomi terdiri dari berbagai aktivitas ekonomi yang serupa. Pembagian sektor tersebut dapat dilakukan berdasarkan tahapan dalam rantai produksi, sumber pendapatan, jenis produk, atau kepemilikan. Contoh pembagian sektor umum yang digunakan adalah sektor primer (pertanian, kehutanan, dan pertambangan), sektor sekunder (industri), dan sektor tersier (jasa). Beberapa penulis juga menyertakan sektor kuartener, yang sebelumnya masuk dalam sektor tersier, dan pembagian berdasarkan kepemilikan: publik vs swasta. Setiap sektor ekonomi memiliki terhadap pertumbuhan ekonomi, bisa meningkatkan atau melemahkan pertumbuhan tersebut. Jika suatu sektor melemah, maka pertumbuhan ekonomi negara juga akan terpengaruh (Deviera & Deris, 2023).

Secara umum perekonomian Indonesia pada tahun 2020-2022 menunjukan tanda-tanda pemulihan yang positif, namun masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi, antara lain inflasi yang meningkat, potensi resesi global dan

ketidakpastian geopolitik. Perkembangan ekonomi atau peningkatan PDRB adalah salah satu ukuran dan indikasi yang diperlukan untuk evaluasi sukses dalam pembangunan ekonomi suatu area diperiksa dari sisi finansial, meskipun tingginya PDRB tidak menjamin sepenuhnya warga setempat telah menikmati keberhasilan PDRB semata-mata adalah gambaran kesejahteraan umum, PDRB hanyalah gambaran umum kesejahteraan masyarakat. Indikator yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan berdampak terhadap masalah kemiskinan yang positif PDRB berkembang menjadi masalah yang signifikan digunakan sebagai ukuran pembangunan. Semakin tinggi PDRB disuatu wilayah, semakin besar sumber penerimaan potensial di daerah karena semakin besar penduduk di daerah tersebut (Nurvita *et al.*, 2022).

Menurut Najmi (2019), Untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah daerah sebagai regulator pembangunan daerah harus menerapkan kebijakan yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi operasi sektor ekonomi yang produktif. Salah satu kebijakan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah dengan membangun infrastruktur dan memfasilitasi terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit institusi disuatu daerah dalam kurun waktu tertentu. PDRB adalah pengukuran kinerja ekonomi suatu negara, peningkatan PDRB menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik, sementara penurunan PDRB menunjukkan masalah dalam ekonomi. PDRB dapat dihitung menggunakan pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Pendekatan ini dapat

meenunjukkan bahwa adanya masalah ekonomi di suatu wilayah (Tjodi *et al.*, 2019).

Dari variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini terdapat korelasi antara PDRB, Kesehatan dan Pendidikan, sedangkan korelasi antara Pendidikan dan PDRB berpengaruh. Dimana Pengaruh variabel Kesehatan berkaitan erat dengan PDRB oleh karena itu Kesehatan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi PDRB di Aceh. Sedangkan pengaruh Pendidikan berkaitan erat dengan PDRB, Pengaruh perbedaan waktu yang berpengaruh pada koefisien korelasi antara variabel Kesehatan, Pendidikan dan Belanja Infrastruktur dengan PDRB di Aceh (BPS Aceh, 2020).

PDRB adalah jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB bisa dihitung berdasarkan harga berlaku atau harga konstan. PDRB harga berlaku mencerminkan nilai tambah barang dan jasa saat ini, sedangkan PDRB harga konstan mencerminkan nilai tambah tersebut dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu. PDRB harga berlaku digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi suatu daerah, sementara PDRB harga konstan digunakan untuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, tanpa memperhitungkan faktor harga (Zaenab *et al.*, 2022). Secara empiris tingkat PDRB Harga Konstan Provinsi Aceh kabupaten/Kota dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel 1.1
PDRB 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2022
(Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Kab. Aceh Barat	7.084.150	7.498.178	7.747.002
Kab. Aceh Besar	10.016.806	10.261.585	10.658.632
Kab. Aceh Selatan	4.241.408	4.345.783	4.480.837
Kab. Aceh Singkil	1.713.664	1.780.419	1.844.667
Kab. Aceh Tengah	5.767.948	6.953.117	6.245.065
Kab. Aceh Tenggara	3.436.343	3.487.156	3.584.206
Kab. Aceh Timur	8.272.641	8.433.526	8.748.419
Kab. Aceh Utara	17.017.452	16.919.102	17.702.778
Kab. Bireun	9.962.578	10.374.479	10.821.127
Kab. Pidie	7.770.640	7.975.099	8.292.685
Kab. Simeulue	1.602.411	1.648.095	1.707.714
Kota Banda Aceh	14.644.288	15.449.971	16.257.930
Kota Sabang	1.122.885	1.152.874	1.181.905
Kota Langsa	3.813.194	3.962.714	4.151.973
Kota Lhokseumawe	6.984.713	7.252.904	7.543.739
Kab. Gayo Lues	1.936.869	1.981.879	2.051.532
Kab. Aceh Barat Daya	2.983.764	3.069.804	3.188.663
kab. Aceh Jaya	1.982.449	2.033.843	2.108.598
Kab. Nagan Raya	6.749.947	7.110.421	7.278.934
Kab. Aceh Tamiang	6.009.374	6.062.520	6.264.034
Kab. Bener Meriah	3.629.870	3.744.094	3.882.430
Kab. Pidie Jaya	2.583.128	2.635.517	2.729.557
Kota Subulussalam	1.318.506	1.438.996	1.498.300
Total Jumlah Kab/ Kota Provinsi Aceh	130.645.028	135.572.076	139.970.727

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa PDRB Provinsi Aceh dari tahun 2020- 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali tahun 2020 yaitu sebesar 130.645.028 miliar rupiah. Kabupaten/Kota yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto yang tinggi tentunya memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh terdapat 4 Kabupaten/Kota yang memiliki rata-rata PDRB tertinggi pada tahun 2020-2022 yaitu meliputi Aceh Utara sebesar 17.702.778, Banda Aceh sebesar 16.257.930, Bireun sebesar 10.821.127 dan Aceh Besar sebesar 10.658.632 (BPS Aceh, 2022).

Pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki peran penting terhadap keberhasilan pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap Provinsi Aceh, harus memenuhi pencapaian yang tinggi, mencapai, mencapai tujuan perencanaan ekonomi, dan mampu menyelesaikan persoalan pengeluaran pemerintahannya pada setiap daerah. Karena setiap daerah mempunyai kebebasan mengelola kekayaan daerahnya sendiri yang dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat daerahnya. Provinsi Aceh dengan keuntungan geografis dan sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki dapat dijadikan modal untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (BPS Provinsi Aceh, 2022).

Pada tabel 1.1 di atas menggunakan data PDRB atas dasar harga Konstan dikarenakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Tabel di atas dapat kita lihat adanya peningkatan pada Kabupaten/Kota yaitu Aceh Besar dan Banda Aceh, sedangkan untuk Aceh Utara mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 16.919.102 miliar rupiah dan meningkat lagi di tahun 2022 sebesar 17.702.778 miliar rupiah. Kabupaten Aceh Utara memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya (BPS Provinsi Aceh, 2022).

Peningkatan PDRB Aceh ini menunjukkan bahwa perekonomian Aceh mengalami pertumbuhan yang positif namun seperti yang kita lihat PDRB di Provinsi Aceh tahun 2020 yang mengalami penurunan yang menyebabkan masyarakatnya akan susah mengakses kesehatan, pendidikan serta infrastruktur yang tidak berjalan dengan baik. Jika dalam suatu daerah masyarakatnya susah mengakses kesehatan, maka masyarakat yang kurang mampu atau dalam keadaan

sakit, maka tidak akan dapat bekerja secara lama dan tidak produktif, serta tenaga kerja yang kurang efisien sehingga membuat masyarakatnya tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan PDRB dalam suatu daerah. Dan apabila masyarakat di dalam suatu daerah mudah mengakses kesehatan, dan rata-rata masyarakatnya dalam keadaan sehat otomatis masyarakatnya kuat dan bisa lama dalam bekerja, secara tidak langsung pendapatan perekonomian masyarakatnya akan meningkat dan akan berpengaruh terhadap perkembangan PDRB dalam suatu daerah (BPS Aceh, 2020).

Diantara 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2020-2022 yang memiliki anggaran paling tinggi dan paling rendah untuk PSK, PSP dan PSBI. Adapun anggaran dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dibidang PSK yang paling tinggi adalah Kota Lhokseumawe, pada tahun 2022 sebesar 984.793 miliar rupiah, dan yang paling rendah adalah Kabupaten Aceh Tenggara, pada tahun 2021 sebesar 102.755 miliar rupiah, sedangkan untuk anggaran dana di bidang PSP Kabupaten/Kota yang paling tinggi adalah Kota Langsa, pada tahun 2022 sebesar 996.257 miliar rupiah dan yang paling rendah adalah Kabupaten Aceh Tenggara, pada tahun 2022 sebesar 103.882 miliar rupiah, dan untuk anggaran dana di bidang PSBI Kabupaten/Kota yang paling tinggi adalah Kota Subussalam, pada tahun 2021 sebesar 921.688 dan yang paling rendah adalah Kota Sabang, pada tahun 2022 sebesar 100.218 miliar rupiah (<https://djpk.kemenkeu.go.id>, dan <https://bpkd.acehprov.go.id>).

Jika pendidikan dalam suatu daerah susah untuk diakses maka masyarakatnya akan kurang ilmu dan pengetahuan, dan kurang mampu untuk bekerja secara

bersaing dengan yang lainnya, dikarenakan kurangnya skill dan keeterampilan dalam dunia pekerjaan, sehingga tidak bisa bekerja dengan optimal maka akan membuat pendapatan masyarakatnya menurun maka akan berpengaruh terhadap perkembangan PDRB. Jika masyarakatnya mudah mengakses pendidikan maka masyarakatnya akan mampu bersaing dalam pekerjaan karena masyarakatnya sudah mempunyai skill yang bagus dan ilmu pengetahuan yang baik tentang pekerjaan menjadikan masyarakatnya lebih efektif, efisien dan lebih optimal dalam bekerja sehingga pendapatan masyarakatnya meningkat dan akan berpengaruh terhadap perkembangan PDRB (BPS Aceh, 2020).

Dan apabila pembangunan infrastruktur dalam suatu daerah itu belum berjalan dengan baik atau belum mencapai target maka pendapatan suatu daerah bisa menurun, misalnya pembangunan jalan yang belum merata, dan masih banyak jalan yang rusak akan berakibat pada masyarakat yang daerahnya jauh dari perkotaan, seperti daerah Takengon dimana masyarakatnya rata-rata bertani, dan saat panen masyarakatnya masih susah untuk membawa hasil panennya keluar dari perkebunan sehingga mereka menjualnya dengan harga murah, dan rata-rata daerah yang jalannya masih banyak rusak mereka susah dalam mengelola barang dan jasa yang mereka produksi, sehingga pendapatan mereka mengalami penurunan dan berpengaruh terhadap perkembangan PDRB, jika pembangunan jalan sudah baik maka masyarakatnya akan mudah membawa dan mengelola barang dan jasa yang mereka produksi sehingga pendapatan mereka ikut meningkat dan PDRB di suatu daerah juga akan meningkat (BPS Aceh, 2022).

Kesehatan dianggap sebagai aspek ekonomi yang penting karena berkontribusi pada peningkatan nilai tambah barang dan jasa. Masalah di dalam sektor kesehatan umumnya terkait dengan kualitas kesehatan yang rendah dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merancang infrastruktur dan sistem jaminan kesehatan yang dapat diakses dan di jangkau oleh semua lapisan masyarakat (Marcheline *et al.*, 2023).

Dana yang di alokasikan oleh pemerintah untuk sektor kesehatan digunakan untuk membiayai program-program pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Tujuan utama dari program- program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan (Yosua *et al.*, 2023). Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor kesehatan sangat penting dalam mengukur tingkat kemiskinan, pemerintah berusaha untuk menjamin bahwa fasilitas layanan kesehatan memiliki mutu yang terjamin dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk yang berpendapatan rendah. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negaranya (Yunita *et al.*, 2023).

Pengeluaran Sektor Kesehatan (PSK) adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk layanan kesehatan, termasuk biaya perawatan medis, pembelian obat-obatan, biaya operasional rumah sakit, pembayaran gaji tenaga medis, dan biaya-biaya yang terkait lainnya. Sedangkan dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 memberikan landasan hukum terkait pengeluaran sektor kesehatan di Indonesia yang menjelaskan tentang kegiatan pendanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemberdayaan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Dari data presentase keluhan kesehatan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesakitan masyarakat/penduduk, maka produktivitas mereka juga cenderung menurun. Gangguan kesehatan yang dialami oleh penduduk dapat menghambat mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal, sehingga berdampak negatif pada tingkat produktifitas, Oleh karena itu pemerintah harus memberikan perhatian serius, akibat terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mencapai komponen tersebut maka berpengaruh pada taraf hidup masyarakat yang semakin menurun (Muttaqien, 2022). Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat (BPS Provinsi Aceh, 2023).

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang di butuhkan dalam kehidupan manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha memanusiakan manusia itu sendiri. Pendidikan merupakan sarana penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Republik Indonesia bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (<https://aceh.bps.go.id>).

Permasalahan Pengeluaran sektor pendidikan (PSP) yang relatif kecil yaitu sebesar Rp2,8 triliun atau 5,8% dari total APBD Aceh. Kualitas pendidikan yang

masih rendah terutama di wilayah-wilayah perdesaan dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas guru yang belum optimal(. Pembangunan infrastruktur yang belum merata menyebabkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi masih jadi tantangan sampai sekarang (Laporan Kajian Ekonomi Aceh 2022 oleh Bank Indonesia & BPS Aceh).

Pembiayaan Pengeluaran sektor pendidikan (PSP) merupakan salah satu indikator dalam menentukan mutu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu di Aceh dapat tercapai jika ditunjang dengan anggaran yang cukup. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus lebih memprioritaskan kepada sektor pendidikan, yang secara aturannya harusnya dialokasikan sebesar 20 persen. Selain anggaran pendidikan dari pemerintah, anggaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk keperluan pendidikan anaknya juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan (Statistik Pendidikan Provinsi Aceh, 2022).

Rendahnya angka partisipasi sekolah, terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah. rendahnya kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Tingginya biaya pendidikan, terutama untuk pendidikan di jenjang pendidikan tinggi dapat menyebabkan masyarakat miskin mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia masyarakat miskin, yang pada akhirnya dapat menghambat peningkatan produktivitas mereka dan meningkatkan risiko mereka untuk jatuh ke dalam kemiskinan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2021).

Salah satu alat untuk Pembangunan Daerah adalah kebijakan infrastruktur, kebijakan ini dapat mempengaruhi kegiatan sosial ekonomi dan kapasitas daerah lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur setiap daerah tidak menjamin daya saing regional, tetapi menciptakan kondisi yang di perlukan untuk mencapai tujuan pembangunan regional (Palei, 2015). Dan dana alokasi khusus merupakan salah satu mekanisme tranfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah (Marzuki *et al.*, 2021)

Pembangunan Infrastruktur jalan secara umum berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi karena memainkan peran penting dalam menyediakan mobilitas yang efisien untuk pergerakan orang, barang, dan jasa serta memberikan aksesibilitas. Pemerintah Daerah dengan otonomi daerah yang memberikan harapan besar bagi daerah agar dapat memanfaatkan potensinya untuk kepentingan daerah sendiri. Dengan melimpahkan kemungkinan serta kendali kepada daerah, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mencapai tujuan otonomi daerah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan bersama, pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah (Jummaini *et al.*, 2023). Penyediaan infrastruktur jalan tidak hanya menurunkan penghalang fisik dengan dengan mempercepat pergerakan orang, barang, dan jasa, tetapi juga meningkatkan akses ke pasar, layanan sosial, dan lapangan kerja dengan mengurangi jumlah transportasi yang digunakan (Asrul *et al.*, 2023).

Oleh karena itu, Peneliti tertarik membuat suatu penelitian berbentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Alokasi Pengeluaran Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan Dan Sektor Belanja Infrastruktur Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Aceh Tahun 2020-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Sektor Kesehatan (PSK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh pada tahun 2020-2022?
2. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Sektor Pendidikan (PSP) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh pada tahun 2020-2022?
3. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Sektor Belanja Infrastruktur (PSBI) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada tahun 2020-2022?
4. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Sektor Kesehatan (PSK), Pengeluaran Sektor Pendidikan (PSP) dan Pengeluaran Sektor Belanja Infrastruktur (PSBI) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Sektor Kesehatan (PSK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh pada tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Sektor Pendidikan (PSP) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh pada tahun 2020-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Sektor Belanja Infrastruktur terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh pada tahun 2020-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Sektor Kesehatan (PSK), Pengeluaran Sektor Pendidikan (PSP) dan Pengeluaran Sektor Belanja Infrastruktur (PSBI) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh pada tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai masalah yang di teliti.

2. Penelitian ini memberikan kontribusi dan pemahaman dengan menyediakan pengetahuan baru mengenai hubungan antara alokasi pengeluaran sektor pendidikan, sektor pendidikan, belanja infastruktur dan PDRB di Aceh serta lebih dapat memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Aceh, sehingga dapat melengkapi dan mengembangkan teori ekonomi yang sudah ada.

1.4.2 Manfaat praktisi

1. Penelitian ini membantu praktisi dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran publik untuk sektor kesehatan, sektos pendidikan, dan sektor belanja infrastruktur dengan tujuan meningkatkan kontribusi mereka terhadap PDRB.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Aceh.
3. Bagi penelti lain, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis.